

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED TAHUN 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG SORONG

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan disertai dengan Lampiran Laporan Keuangan meliputi informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Sorong Audited TA 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Sorong. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sorong, 04 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Khusnul Arifin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	5
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	7
II. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	9
III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	11
IV. NERACA	12
V. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN	13
LAMPIRAN 1 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
A. PENJELASAN ATAS POS-POS LRA	20
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LO	22
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LPE	23
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	23
LAMPIRAN 2 INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA	26
A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU	26
B. INFORMASI PENTING LAINNYA	27
LAMPIRAN 3 CAPAIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN	30
LAMPIRAN 4 TELAAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	33

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PAPUA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA SORONG JALAN BASUKI RAHMAT KM. 7, KOTA SORONG, PAPUA BARAT DAYA
98416 TELEPON (0951) 324868; LAMAN WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan disertai dengan Lampiran Laporan Keuangan meliputi informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya Audited Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sorong, 04 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Khusnul Arifin

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong Audited Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Audited TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3,401,897,339, atau mencapai 51,37% persen dari estimasi Pendapatan sebesar Rp6,622,301,000. Realisasi Belanja Negara pada Audited TA 2025 adalah sebesar Rp2,075,537,515 atau mencapai 75,65% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2,743,518,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per Audited TA 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp13,964,977,742 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp263,470,892 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp13,701,506,850. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp205,000,000 dan Rp13,759,977,742.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3,341,799,339 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp2,295,926,055 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp121,006,263.

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1,045,873,248, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp1,105,971,284.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 13,931,518,700. Surplus-LO adalah sebesar Rp1,105,971,284. Terdapat Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1,277,512,242 sehingga terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp171,540,958. Sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 13,759,977,742.

5. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong Audited Tahun 2025 dilampiri dengan catatan atas laporan keuangan (CALK), informasi keuangan tertentu, dan informasi penting lainnya serta data capaian output per fungsi dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG 537990

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 6:40 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,622,301,000	3,401,897,339	(3,220,403,661)	51	2,267,290,000	2,829,799,189	(562,509,189)	125
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,622,301,000	3,401,897,339	(3,220,403,661)	51	2,267,290,000	2,829,799,189	(562,509,189)	125
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	6,622,301,000	3,401,897,339	(3,220,403,661)	51	2,267,290,000	2,829,799,189	(562,509,189)	125
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,743,518,000	2,075,537,515	(667,980,485)	76	3,233,737,000	3,099,294,371	134,442,629	96
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,247,718,000	1,813,637,515	(434,080,485)	81	1,836,048,000	1,707,232,371	128,815,629	93
3. Belanja Modal	495,800,000	261,900,000	(233,900,000)	53	1,397,689,000	1,392,062,000	5,627,000	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG 537990

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 6:40 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,743,518,000	2,075,537,515	(667,980,485)	76	3,233,737,000	3,099,294,371	134,442,629	96
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

SORONG, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KHUSNUL ARIFIN
NIP. 197806012000011001

II. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
SATUAN KERJA : (537990) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
 LELANG SORONG

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
 Tgl Cetak : 07/05/26 6:58 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,341,799,339	2,829,799,189	512,000,150	18.093
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,341,799,339	2,829,799,189	512,000,150	18.093
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,341,799,339	2,829,799,189	512,000,150	18.093
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	81,384,206	54,567,564	26,816,642	49.144
Beban Barang dan Jasa	780,603,910	706,034,332	74,569,578	10.562
Beban Pemeliharaan	397,547,377	315,311,243	82,236,134	26.081
Beban Perjalanan Dinas	520,662,542	619,653,036	(98,990,494)	(15.975)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
SATUAN KERJA : (537990) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SORONG

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 6:43 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	515,728,020	508,960,641	6,767,379	1.33
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,295,926,055	2,204,526,816	91,399,239	4.146
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	1,045,873,284	625,272,373	420,600,911	67.267
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	60,098,000	0	60,098,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	60,098,000	0	60,098,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	60,098,000	0	60,098,000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1,105,971,284	625,272,373	480,698,911	76.878
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	1,105,971,284	625,272,373	480,698,911	76.878

Keterangan :

FINAL

SORONG, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KHUSNUL ARIFIN
NIP 197806012000011001

III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
 SATUAN KERJA : (537990) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
 LELANG SORONG

Tgl Data : 07/05/26 12:36 AM
 Tgl Cetak : 07/05/26 6:53 AM
 Halaman : 1
 lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	13,931,518,700	13,021,132,395	910,386,305	6.99
SURPLUS/DEFISIT-LO	1,105,971,284	625,272,373	480,698,911	76.88
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,277,512,242)	285,113,932	(1,562,626,174)	(548.07)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(171,540,958)	910,386,305	(1,081,927,263)	(118.84)
EKUITAS AKHIR	13,759,977,742	13,931,518,700	(171,540,958)	(1.23)

Keterangan :
 FINAL

SORONG, 7 Mei 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KHUSNUL ARIFIN
 NIP 197806012000011001

IV. NERACA

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
 SATUAN KERJA : (537990) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
 LELANG SORONG

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 6:54 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	205,000,000	1,005,574,357	(800,574,357)	(79.61)
Persediaan	58,470,892	26,524,012	31,946,880	120.45
JUMLAH ASET LANCAR	263,470,892	1,032,098,369	(768,627,477)	(74.47)
ASET TETAP				
Tanah	8,801,994,000	8,801,994,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,619,445,252	5,744,095,085	(124,649,833)	(2.17)
Gedung dan Bangunan	4,146,029,000	4,146,029,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	15,590,690	15,590,690	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,881,552,092)	(4,799,549,605)	(82,002,487)	1.71
JUMLAH ASET TETAP	13,701,506,850	13,908,159,170	(206,652,320)	(1.49)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	532,980,140	312,226,107	220,754,033	70.70
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(532,980,140)	(312,226,107)	(220,754,033)	70.70
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	13,964,977,742	14,940,257,539	(975,279,797)	(6.53)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	205,000,000	1,008,738,839	(803,738,839)	(79.68)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	205,000,000	1,008,738,839	(803,738,839)	(79.68)
JUMLAH KEWAJIBAN	205,000,000	1,008,738,839	(803,738,839)	(79.68)
EKUITAS				
Ekuitas	13,759,977,742	13,931,518,700	(171,540,958)	(1.23)
JUMLAH EKUITAS	13,759,977,742	13,931,518,700	(171,540,958)	(1.23)
JUMLAH EKUITAS	13,759,977,742	13,931,518,700	(171,540,958)	(1.23)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	13,964,977,742	14,940,257,539	(975,279,797)	(6.53)

Keterangan :

FINAL

SORONG, 7 Mei 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KHUSNUL ARIFIN
 NIP 197806012000011001

V. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN 1 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

A. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tanggal 30 Juni 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KM.1/2019 tanggal 30 Juni 2023 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Kantor Pelayanan.

2. Profil Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diperbarui oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau hal-hal lain terkait dengan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 154/PMK.1/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku memiliki unit pelayanan yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong.

3. Pendekatan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audited TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

4. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I

- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
 - Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
 - Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- c. Belanja
- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Beban
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset
- Aset Lancar
 - Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
 - Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ✓ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

- Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - ✓ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - ✓ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - ✓ Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

- Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

- Aset Lainnya
 - Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
 - Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas
- f. Kewajiban
 - Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
- h. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
 - Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan PMK 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

i. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 259/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

j. Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3,401,897,339 atau mencapai 51,37% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6,622,301,000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp2,075,537,515 atau 75,65% dari anggaran belanja setelah revisi yaitu sebesar Rp2,743,518,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.247.718.000	1.813.637.515	80,69%
Belanja Modal	495.800.000	261.900.000	52,82%
Total Belanja Kotor	2.743.518.000	2.075.537.515	75,65%
Pengembalian Belanja		-	
Jumlah	2.743.518.000	2.075.537.515	75,65%

Realisasi Belanja Tahun 2025 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp1.400.823.705 atau 82,23% dari pagu anggaran sebesar Rp1.703.606.000 dan Belanja Modal sebesar Rp169.774.500 atau 49,93% dari pagu anggaran sebesar Rp340.000.000. Baik Realisasi Belanja Barang maupun Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi dan blokir anggaran pada TA 2025.

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	80,69%	92,98%	-12,29%
Belanja Modal	52,82%	99,60%	-46,78%

- a) Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. Realisasi belanja pegawai TA 2025 sama dengan TA 2024, antara lain disebabkan karena adanya kebijakan sentralisasi Belanja Pegawai.
- b) Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan 12,29% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi dan blokir anggaran yang diberlakukan pada tahun anggaran 2025.
- c) Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan 46,78% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini juga disebabkan oleh kebijakan blokir anggaran pada TA 2025 sebesar 50% dari pagu belanja modal.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa PNBP Lainnya merupakan pendapatan operasional meliputi Pendapatan Bea Lelang, Pendapatan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Jasa Lainnya, dan Pendapatan Anggaran Lain-lain yaitu total sebesar Rp6,622,301,000 dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pos LRA.

2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp81,384,799,399. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 adalah sebesar Rp780,603,910

4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp397,547,377 yang berasal dari beban pemeliharaan peralatan dan mesin.

5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 adalah sebesar Rp520,662,542 yang berasal dari beban perjalanan dinas biasa dan beban perjalanan dinas dalam kota.

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp515,728,020. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

7. Pendapatan Pelepasan Aset

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp60,098,000 yang berasal dari pemindahtanganan BMN berupa inventaris

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp13,931,518,700.

2. Surplus/Defisit-LO

Pada Tahun 2025 terdapat surplus LO sebesar Rp1,105,971,284.

3. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas adalah selisih antara saldo akun yang ditagihkan ke entitas lain dan saldo akun diterima dari entitas lain ditambah dengan transaksi masuk atau dikurangi dengan transaksi keluar. Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2025 adalah sebesar Rp(1,277,512,242).

4. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Merupakan selisih antara Surplus LO dan Transaksi Antar Entitas yaitu sebesar Rp(171,540,958).

5. Ekuitas Akhir

Merupakan Ekuitas Awal ditambah dengan Kenaikan/Penurunan Ekuitas yaitu sebesar Rp13,759,977,742.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas lainnya dan setara kas berasal dari bea materai yang belum disetorkan ke perum peruri oleh bendahara penerimaan sebesar Rp205,000,000

2. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah adalah sebesar Rp8,801,994,000.

3. Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin adalah pada TA sebesar Rp5,619,445,252. Sementara itu nilai pada TA 2024 adalah sebesar Rp5,774,095,085 atau mengalami Penurunan sebesar Rp124,649,833.

4. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4,146,029,000.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah Rp4,881,552,092. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

6. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp532,980,140. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

7. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp532,980,140. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

8. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp205,000,000.

9. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp13,759,742. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

LAMPIRAN 2 INFORMASI KEUANGAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2025

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025								
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;								
Periode Desember 2025								
Kementerian:	015	KEMENTERIAN KEUANGAN						
Unit Organisasi:	09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA						
Satuan Kerja :	537990	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG						
			Hal 1 dari 13					
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%		
JUMLAH SELURUHNYA	2.158.253.000	0	1.035.754.510	130.763.005	2.075.537.515	96,17 %	82.715.485	
CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	458.903.000	0	419.866.394	26.249.000	446.115.394	97,21 %	12.787.606	
CD.4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	57.110.000	0	48.744.250	5.400.000	54.144.250	94,81 %	2.965.750	
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	57.110.000	0	48.744.250	5.400.000	54.144.250	94,81 %	2.965.750	
AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	52.800.000	0	44.709.250	5.400.000	50.109.250	94,90 %	2.690.750	
100 Tidak Ada Komponen	52.800.000	0	44.709.250	5.400.000	50.109.250	94,90 %	2.690.750	
100.0A Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	52.800.000	0	44.709.250	5.400.000	50.109.250	94,90 %	2.690.750	
521211 Belanja Bahan	1.400.000	0	1.250.000	0	1.250.000	89,29 %	150.000	
000001. Belanja Bahan Cetakan, Penggandaan, dan Bahan Lainnya	0	0	0	0	0	0,00 %	0	
000002. Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT DAYA	0	0	0	0	0	0,00 %	0	
000003. Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT DAYA	1.400.000	0	1.250.000	0	1.250.000	89,29 %	150.000	
522151 Belanja Jasa Profesi	5.400.000	0	0	5.400.000	5.400.000	#####	0	
000004. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III yang disetarakan	5.400.000	0	0	5.400.000	5.400.000	#####	0	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.000.000	0	43.459.250	0	43.459.250	94,48 %	2.540.750	
000005. Uang Harian	13.824.000	0	13.824.000	0	13.824.000	#####	0	
000006. Transport	17.504.000	0	17.345.250	0	17.345.250	99,09 %	158.750	
000007. Penginapan	14.672.000	0	12.290.000	0	12.290.000	83,76 %	2.382.000	
AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	2.700.000	0	2.425.000	0	2.425.000	89,81 %	275.000	
100 Tidak Ada Komponen	2.700.000	0	2.425.000	0	2.425.000	89,81 %	275.000	
100.0A Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD di Bidang Piutang Negara	2.700.000	0	2.425.000	0	2.425.000	89,81 %	275.000	
521211 Belanja Bahan	2.700.000	0	2.425.000	0	2.425.000	89,81 %	275.000	
000011. Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT DAYA	1.860.000	0	1.685.000	0	1.685.000	90,59 %	175.000	
000012. Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT	840.000	0	740.000	0	740.000	88,10 %	100.000	
AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	1.610.000	0	1.610.000	0	1.610.000	#####	0	
100 Tidak Ada Komponen	1.610.000	0	1.610.000	0	1.610.000	#####	0	
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir								
100.0A Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	1.610.000	0	1.610.000	0	1.610.000	#####	0	
521211 Belanja Bahan	1.610.000	0	1.610.000	0	1.610.000	#####	0	
000008. Makan Rapat Biasa	1.260.000	0	1.260.000	0	1.260.000	#####	0	
000009. Snack Rapat Biasa	350.000	0	350.000	0	350.000	#####	0	
000010. Backdrop dan Banner	0	0	0	0	0	0,00 %	0	
CD.4796 Pengelolaan Aset	401.793.000	0	371.122.144	20.849.000	391.971.144	97,56 %	9.821.856	
AAH Peraturan lainnya	180.009.000	0	157.194.677	16.633.000	173.827.677	96,57 %	6.181.323	
AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	141.985.000	0	128.254.345	12.800.000	141.054.345	99,34 %	930.655	
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	141.985.000	0	128.254.345	12.800.000	141.054.345	99,34 %	930.655	
005.0A Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPFKNL	20.497.000	0	17.421.300	2.304.000	19.725.300	96,24 %	771.700	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.316.000	0	17.421.300	2.304.000	19.725.300	97,09 %	590.700	
000018. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	7.296.000	0	4.608.000	2.304.000	6.912.000	94,74 %	384.000	
000019. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan III	6.888.000	0	6.803.000	0	6.803.000	98,77 %	85.000	
000020. Transport	6.132.000	0	6.010.300	0	6.010.300	98,02 %	121.700	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	181.000	0	0	0	0	0,00 %	181.000	
000021. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Papua Barat)	181.000	0	0	0	0	0,00 %	181.000	
005.0B Survey Lapangan dan Penilaian	121.488.000	0	110.833.045	10.496.000	121.329.045	99,87 %	158.955	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114.800.000	0	104.145.045	10.496.000	114.641.045	99,86 %	158.955	
000022. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	27.648.000	0	27.648.000	0	27.648.000	#####	0	
000023. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan III (PAPUA BARAT)	45.808.000	0	39.347.945	6.302.000	45.649.945	99,65 %	158.055	
000024. Transport	41.344.000	0	37.149.100	4.194.000	41.343.100	#####	900	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.688.000	0	6.688.000	0	6.688.000	#####	0	
000025. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Papua Barat)	6.688.000	0	6.688.000	0	6.688.000	#####	0	
AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	38.024.000	0	28.940.332	3.833.000	32.773.332	86,19 %	5.250.668	
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	38.024.000	0	28.940.332	3.833.000	32.773.332	86,19 %	5.250.668	
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir								
005.0A Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara	38.024.000	0	28.940.332	3.833.000	32.773.332	86,19 %	5.250.668	
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	27.000.000	0	21.750.000	0	21.750.000	80,56 %	5.250.000	
000013. Anggota	27.000.000	0	21.750.000	0	21.750.000	80,56 %	5.250.000	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.352.000	0	5.518.332	3.833.000	9.351.332	99,99 %	668	
000014. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	6.144.000	0	2.688.000	3.456.000	6.144.000	#####	0	
000015. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan III (PAPUA BARAT)	1.060.000	0	800.000	260.000	1.060.000	#####	0	
000016. Transport	2.148.000	0	2.030.332	117.000	2.147.332	99,97 %	668	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.672.000	0	1.672.000	0	1.672.000	#####	0	
000017. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1.672.000	0	1.672.000	0	1.672.000	#####	0	
ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	36.192.000	0	34.881.074	1.152.000	36.033.074	99,56 %	158.926	
ABA.002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	36.192.000	0	34.881.074	1.152.000	36.033.074	99,56 %	158.926	
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	36.192.000	0	34.881.074	1.152.000	36.033.074	99,56 %	158.926	
005.0A Implementasi Evaluasi Kajian Portofolio Aset	36.192.000	0	34.881.074	1.152.000	36.033.074	99,56 %	158.926	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.736.000	0	34.577.074	1.152.000	35.729.074	99,98 %	6.926	
000026. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	10.752.000	0	10.120.000	632.000	10.752.000	#####	0	
000027. Transportasi	16.584.000	0	16.105.074	472.000	16.577.074	99,96 %	6.926	

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong Audited Tahun 2025

	000028. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas	8.400.000	0	8.352.000	48.000	8.400.000	#####	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	456.000	0	304.000	0	304.000	66,67 %	152.000
	000029. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Papua Barat Daya)	456.000	0	304.000	0	304.000	66,67 %	152.000
BAH Pelayanan Publik Lainnya		47.376.000	0	44.882.271	1.536.000	46.418.271	97,98 %	957.729
BAH.001	Risalah Lelang	47.376.000	0	44.882.271	1.536.000	46.418.271	97,98 %	957.729
100	Tidak Ada Komponen	47.376.000	0	44.882.271	1.536.000	46.418.271	97,98 %	957.729
100.0A	Pelaksanaan Lelang dan Pembuatan Risalah	47.376.000	0	44.882.271	1.536.000	46.418.271	97,98 %	957.729
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.768.000	0	44.426.271	1.536.000	45.962.271	98,28 %	805.729
	000031. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	16.128.000	0	14.592.000	1.536.000	16.128.000	#####	0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir								
	Barat)	16.128.000	0	14.592.000	1.536.000			0
	000032. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas	12.640.000	0	12.509.500	0	12.509.500	98,97 %	130.500
	000033. Transport	18.000.000	0	17.324.771	0	17.324.771	96,25 %	675.229
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	608.000	0	456.000	0	456.000	75,00 %	152.000
	000034. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	608.000	0	456.000	0	456.000	75,00 %	152.000
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		120.446.000	0	117.357.768	760.000	118.117.768	98,07 %	2.328.232
FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara		16.668.000	0	13.880.940	760.000	14.640.940	87,84 %	2.027.060
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	16.668.000	0	13.880.940	760.000	14.640.940	87,84 %	2.027.060
005.0A	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN	16.668.000	0	13.880.940	760.000	14.640.940	87,84 %	2.027.060
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.300.000	0	13.272.940	0	13.272.940	86,75 %	2.027.060
	000035. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	4.224.000	0	4.224.000	0	4.224.000	#####	0
	000036. Biaya Penginapan Perjalan Dinas Golongan III (PAPUA BARAT)	4.644.000	0	3.080.000	0	3.080.000	66,32 %	1.564.000
	000037. Transport	6.432.000	0	5.968.940	0	5.968.940	92,80 %	463.060
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.368.000	0	608.000	760.000	1.368.000	#####	0
	000038. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Papua Barat)	1.368.000	0	608.000	760.000	1.368.000	#####	0
FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian		70.348.000	0	70.314.391	0	70.314.391	99,95 %	33.609
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	70.348.000	0	70.314.391	0	70.314.391	99,95 %	33.609
005.0A	Survei Basis Data	7.752.000	0	7.752.000	0	7.752.000	#####	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.752.000	0	7.752.000	0	7.752.000	#####	0
	000044. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Papua Barat)	7.752.000	0	7.752.000	0	7.752.000	#####	0
005.0B	Penyusunan DKPB	10.488.000	0	10.488.000	0	10.488.000	#####	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.488.000	0	10.488.000	0	10.488.000	#####	0
	000045. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Papua Barat)	10.488.000	0	10.488.000	0	10.488.000	#####	0
005.0C	Penilaian Barang Rampasan	52.108.000	0	52.074.391	0	52.074.391	99,94 %	33.609
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.108.000	0	52.074.391	0	52.074.391	99,94 %	33.609
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir								
	000046. Uang Harian	13.248.000	0	13.248.000	0	13.248.000	#####	0
	000047. Transport	25.620.000	0	25.606.391	0	25.606.391	99,95 %	13.609
	000048. Penginapan	13.240.000	0	13.220.000	0	13.220.000	99,85 %	20.000
FAE.007 Penggalian Potensi Lelang		33.430.000	0	33.162.437	0	33.162.437	99,20 %	267.563
100	Tidak Ada Komponen	33.430.000	0	33.162.437	0	33.162.437	99,20 %	267.563
100.0A	Penggalian Potensi Lelang	33.430.000	0	33.162.437	0	33.162.437	99,20 %	267.563
521211	Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000039. Brosur, spanduk	0	0	0	0	0	0,00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.974.000	0	32.706.437	0	32.706.437	99,19 %	267.563
	000040. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	13.440.000	0	13.440.000	0	13.440.000	#####	0
	000041. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Gol III (Papua Barat)	5.902.000	0	5.889.500	0	5.889.500	99,79 %	12.500
	000042. Transport	13.632.000	0	13.376.937	0	13.376.937	98,13 %	255.063
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	456.000	0	456.000	0	456.000	#####	0
	000043. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	456.000	0	456.000	0	456.000	#####	0
UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		17.770.000	0	16.806.354	768.000	17.574.354	98,90 %	195.646
UAE.201 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipkatkan (PN)		17.770.000	0	16.806.354	768.000	17.574.354	98,90 %	195.646
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	17.770.000	0	16.806.354	768.000	17.574.354	98,90 %	195.646
005.0A	TANPA SUB KOMPONEN	17.770.000	0	16.806.354	768.000	17.574.354	98,90 %	195.646
521211	Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000049. Makan Rapat Biasa (Papua Barat Daya)	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000050. Snack Rapat Biasa (Papua Barat Daya)	0	0	0	0	0	0,00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.694.000	0	16.806.354	768.000	17.574.354	99,32 %	119.646
	000051. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat Daya)	4.224.000	0	3.456.000	768.000	4.224.000	#####	0
	000052. Transport	9.950.000	0	9.834.650	0	9.834.650	98,84 %	115.350
	000053. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT DAYA)	3.520.000	0	3.515.704	0	3.515.704	99,88 %	4.296
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir								
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.000	0	0	0	0	0,00 %	76.000
	000054. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Papua Barat Daya)	76.000	0	0	0	0	0,00 %	76.000
W	Program Dukungan Manajemen	1.699.350.000	0	1.515.888.116	113.534.005	1.629.422.121	95,89 %	69.927.879
A	Legislasi dan Litigasi	36.304.000	0	32.268.597	0	32.268.597	88,88 %	4.035.403
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		36.304.000	0	32.268.597	0	32.268.597	88,88 %	4.035.403
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum		36.304.000	0	32.268.597	0	32.268.597	88,88 %	4.035.403
100	Tidak Ada Komponen	36.304.000	0	32.268.597	0	32.268.597	88,88 %	4.035.403
100.0A	Pelaksanaan Advokasi Hukum	36.304.000	0	32.268.597	0	32.268.597	88,88 %	4.035.403
521211	Belanja Bahan	1.500.000	0	0	0	0	0,00 %	1.500.000
	000055. Belanja Bahan Cetakn, Penggandaan, dan Bahan Lainnya	1.500.000	0	0	0	0	0,00 %	1.500.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	820.000	0	0	0	0	0,00 %	820.000
	000056. Biaya Beracara di Pengadilan	820.000	0	0	0	0	0,00 %	820.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.072.000	0	31.812.597	0	31.812.597	96,19 %	1.259.403
	000057. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	6.912.000	0	6.792.000	0	6.792.000	98,26 %	120.000

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong Audited Tahun 2025

	000058. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan III (PAPUA BARAT)	7.600.000	0	6.520.016	0	6.520.016	85,79 %	1.079.984
	000059. Transport	18.560.000	0	18.500.581	0	18.500.581	99,68 %	59.419
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	912.000	0	456.000	0	456.000	50,00 %	456.000
	000060. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Papua Barat)	912.000	0	456.000	0	456.000	50,00 %	456.000
WA.4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.639.583.000	0	1.467.366.828	110.478.005	1.577.844.833	96,23 %	61.738.167
	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	#####	0
	CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	#####	0
	100 Tidak Ada Komponen	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	#####	0
100.TG	Jaringan	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	#####	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	#####	0
	000061. Live Switcher	0	0	0	0	0	0,00 %	0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir								
	000174. Live Switcher	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	#####	0
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.377.683.000	0	1.205.466.828	110.478.005	1.315.944.833	95,52 %	61.738.167
	EBA.002 Kerumahtanggaan	77.767.000	0	68.006.560	2.750.671	70.757.231	90,99 %	7.009.769
	100 Tidak Ada Komponen	77.767.000	0	68.006.560	2.750.671	70.757.231	90,99 %	7.009.769
100.OA	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	77.767.000	0	68.006.560	2.750.671	70.757.231	90,99 %	7.009.769
521211	Belanja Bahan	15.424.000	0	10.401.700	2.750.671	13.152.371	85,27 %	2.271.629
	000120. Belanja Bahan Cetakn, Penggandaan, dan Bahan Lainnya	15.424.000	0	10.401.700	2.750.671	13.152.371	85,27 %	2.271.629
522151	Belanja Jasa Profesi	4.400.000	0	400.000	0	400.000	9,09 %	4.000.000
	000121. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	3.600.000	0	0	0	0	0,00 %	3.600.000
	000122. Honorarium Rohaniawan	800.000	0	400.000	0	400.000	50,00 %	400.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.031.000	0	56.748.860	0	56.748.860	99,51 %	282.140
	000123. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	13.440.000	0	13.178.000	0	13.178.000	98,05 %	262.000
	000124. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan III (PAPUA BARAT)	10.976.000	0	10.976.000	0	10.976.000	#####	0
	000125. Transport	32.615.000	0	32.594.860	0	32.594.860	99,94 %	20.140
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	912.000	0	456.000	0	456.000	50,00 %	456.000
	000126. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Papua Barat)	912.000	0	456.000	0	456.000	50,00 %	456.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.299.916.000	0	1.137.460.268	107.727.334	1.245.187.602	95,79 %	54.728.398
	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.299.916.000	0	1.137.460.268	107.727.334	1.245.187.602	95,79 %	54.728.398
002.OA	Pembayaran Biaya Operasional Kantor	888.446.000	0	748.796.141	98.844.084	847.640.225	95,41 %	40.805.775
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	567.231.000	0	484.011.361	71.517.584	555.528.945	97,94 %	11.702.055
	000062. keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Papua Barat Daya)	93.630.000	0	77.822.970	13.505.984	91.328.954	97,54 %	2.301.046
	000063. Honorarium Makan Lembur Pengemudi PAPUA BARAT DAYA	300.000	0	0	0	0	0,00 %	300.000
	000064. Honorarium Makan Lembur Satpam PAPUA BARAT DAYA	1.200.000	0	0	0	0	0,00 %	1.200.000
	000065. Pakaiannya Pegawai/Perawat (Papua Barat Daya)	63.296.000	0	63.249.465	0	63.249.465	99,93 %	46.535
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir								
	000066. Pakaiannya Satpam (Papua Barat Daya)	10.160.000	0	10.000.000	0	10.000.000	98,43 %	160.000
	000067. Pakaiannya Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Papua Barat Daya)	2.772.000	0	2.700.000	0	2.700.000	97,40 %	72.000
	000068. Biaya Jamuan Tamu	26.099.000	0	20.940.926	1.775.600	22.716.526	87,04 %	3.382.474
	000069. Honorarium Satpam dan Pengemudi Papua Barat Daya	247.440.000	0	206.200.000	41.240.000	247.440.000	#####	0
	000070. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Papua Barat Daya	89.976.000	0	74.980.000	14.996.000	89.976.000	#####	0
	000071. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Papua Barat Daya	7.498.000	0	7.498.000	0	7.498.000	#####	0
	000072. Honorarium Satpam dan Pengemudi Papua Barat Daya	20.620.000	0	20.620.000	0	20.620.000	#####	0
	000073. Honorarium Lembur Petugas Kebersihan dan Pramubakti PAPUA BARAT DAYA	1.040.000	0	0	0	0	0,00 %	1.040.000
	000074. Honorarium Lembur Pengemudi PAPUA BARAT DAYA	520.000	0	0	0	0	0,00 %	520.000
	000075. Honorarium Lembur Satpam PAPUA BARAT DAYA	2.080.000	0	0	0	0	0,00 %	2.080.000
	000076. Honorarium Makan Lembur Petugas Kebersihan dan Pramubakti PAPUA BARAT DAYA	600.000	0	0	0	0	0,00 %	600.000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	19.800.000	0	19.595.194	0	19.595.194	98,97 %	204.806
	000077. Penambah Daya Tahan Tubuh (Papua Barat)	19.800.000	0	19.595.194	0	19.595.194	98,97 %	204.806
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.000.000	0	9.713.500	3.429.500	13.143.000	73,02 %	4.857.000
	000078. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	18.000.000	0	9.713.500	3.429.500	13.143.000	73,02 %	4.857.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	105.840.000	0	85.800.000	17.640.000	103.440.000	97,73 %	2.400.000
	000080. Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	5.640.000	0	4.700.000	940.000	5.640.000	#####	0
	000081. Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	8.400.000	0	7.000.000	1.400.000	8.400.000	#####	0
	000083. Honorarium Alasannya Langsung Bendahara Pengelola PNPB (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	7.800.000	0	6.500.000	1.300.000	7.800.000	#####	0
	000084. Honorarium Bendahara Pengelola PNPB (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	6.360.000	0	5.300.000	1.060.000	6.360.000	#####	0
	000085. Honorarium Anggota Pengelola PNPB (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	14.400.000	0	9.600.000	2.400.000	12.000.000	83,33 %	2.400.000
	000087. Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang 2 ORG x 12 BLN	4.320.000	0	3.600.000	720.000	4.320.000	#####	0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir								
	000089. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 ORG x 12 BLN	8.160.000	0	6.800.000	1.360.000	8.160.000	#####	0
	000090. Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	2.400.000	0	2.000.000	400.000	2.400.000	#####	0
	000091. Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) 1 ORG x 12 BLN	2.400.000	0	2.000.000	400.000	2.400.000	#####	0
	000092. Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) 1 ORG x 12 BLN	1.800.000	0	1.500.000	300.000	1.800.000	#####	0
	000093. Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) 3 ORG x 12 BLN	5.400.000	0	4.500.000	900.000	5.400.000	#####	0
	000095. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	16.440.000	0	13.700.000	2.740.000	16.440.000	#####	0
	000096. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	6.360.000	0	5.300.000	1.060.000	6.360.000	#####	0
	000097. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	15.960.000	0	13.300.000	2.660.000	15.960.000	#####	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	54.290.000	0	36.345.000	6.257.000	42.602.000	78,47 %	11.688.000
	000098. Biaya Tes Narkoba Pegawai	4.290.000	0	0	0	0	0,00 %	4.290.000
	000162. Medical Check Up Pegawai	50.000.000	0	36.345.000	6.257.000	42.602.000	85,20 %	7.398.000

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong Audited Tahun 2025

521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	123.285.000	0	113.331.086	0	113.331.086	91,93 %	9.953.914
	000099. Bahan ATK	123.285.000	0	113.331.086	0	113.331.086	91,93 %	9.953.914
002.0B	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	236.760.000	0	221.236.127	4.883.250	226.119.377	95,51 %	10.640.623
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	236.760.000	0	221.236.127	4.883.250	226.119.377	95,51 %	10.640.623
	000101. Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	#####	0
	000102. Pemeliharaan Mesin Fotocopy	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	#####	0
	000103. Pemeliharaan CCTV Kantor	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	#####	0
	000104. Pemeliharaan Televisi	3.650.000	0	3.400.000	0	3.400.000	93,15 %	250.000
	000105. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Papua Barat Daya)	135.600.000	0	130.461.810	3.283.250	133.745.060	98,63 %	1.854.940
	000106. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 Double Garden (Papua Barat Daya)	35.090.000	0	34.905.000	0	34.905.000	99,47 %	185.000
	000107. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Papua Barat Daya)	16.200.000	0	12.604.517	400.000	13.004.517	80,27 %	3.195.483
	000109. Pemeliharaan Inventaris Kantor	1.840.000	0	1.256.000	0	1.256.000	68,26 %	584.000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir								
	000110. Pemeliharaan Tabung Api	3.040.000	0	1.960.000	0	1.960.000	64,47 %	1.080.000
	000111. Pemeliharaan AC Split	17.080.000	0	13.648.800	0	13.648.800	79,91 %	3.431.200
	000112. Pemeliharaan Genset 150 KVA	13.260.000	0	12.000.000	1.200.000	13.200.000	99,55 %	60.000
002.0C	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	113.210.000	0	112.028.000	0	112.028.000	98,96 %	1.182.000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	113.210.000	0	112.028.000	0	112.028.000	98,96 %	1.182.000
	000113. Pemeliharaan Halaman Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (Jl Jenderal Sudirman No 8 Sorong)	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	#####	0
	000114. Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (Gudang BMN KPKNL Sorong Jl Jenderal Sudirman No 8 Sorong)	79.917.000	0	79.528.000	0	79.528.000	99,51 %	389.000
	000115. Pemeliharaan Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Gudang Arsip KPKNL Sorong Jl Jenderal Sudirman No 8 Sorong)	21.793.000	0	21.000.000	0	21.000.000	96,36 %	793.000
002.TJ	Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS)	61.500.000	0	55.400.000	4.000.000	59.400.000	96,59 %	2.100.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.500.000	0	55.400.000	4.000.000	59.400.000	96,59 %	2.100.000
	000116. Pemeliharaan Unit Power Supply (UPS)	14.950.000	0	9.600.000	4.000.000	13.600.000	90,97 %	1.350.000
	000117. Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	31.390.000	0	31.000.000	0	31.000.000	98,76 %	390.000
	000118. Pemeliharaan Printer	9.660.000	0	9.600.000	0	9.600.000	99,38 %	60.000
	000119. Pemeliharaan Scanner	5.500.000	0	5.200.000	0	5.200.000	94,55 %	300.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	255.400.000	0	255.400.000	0	255.400.000	#####	0
EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	227.400.000	0	227.400.000	0	227.400.000	#####	0
100	Tidak Ada Komponen	227.400.000	0	227.400.000	0	227.400.000	#####	0
100.0A	TANPA SUB KOMPONEN	227.400.000	0	227.400.000	0	227.400.000	#####	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.400.000	0	227.400.000	0	227.400.000	#####	0
	000130. Sound System	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000131. Kursi Kerja	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000132. Locker	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000133. Meja Rapat	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000134. Meja Kerja Panjang	0	0	0	0	0	0,00 %	0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir								
	000135. AC Split 2 PK	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000136. Video Transmitter	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000137. Mic Lavalier	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000138. Mesin Pemotong Rumput	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000186. Kursi Kerja	51.000.000	0	51.000.000	0	51.000.000	#####	0
	000187. Locker	33.000.000	0	33.000.000	0	33.000.000	#####	0
	000188. Meja Rapat	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	#####	0
	000189. Meja Kerja Panjang	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	#####	0
	000190. AC Split 2 PK	68.400.000	0	68.400.000	0	68.400.000	#####	0
	000191. Video Transmitter	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	#####	0
	000192. Mic Lavalier	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	#####	0
	000193. Mesin Pemotong Rumput	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	#####	0
	000194. Sound System	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	#####	0
EBB.003	Kendaraan Bermotor	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	#####	0
100	Tidak Ada Komponen	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	#####	0
100.KA	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	#####	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	#####	0
	000128. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	#####	0
WA.4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	8.376.000	0	3.466.000	1.536.000	5.002.000	59,72 %	3.374.000
BMB	Komunikasi Publik	8.376.000	0	3.466.000	1.536.000	5.002.000	59,72 %	3.374.000
BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	0	0	0	0	0	0,00 %	0
100	Tidak Ada Komponen	0	0	0	0	0	0,00 %	0
100.0A	Pelaksanaan Publikasi	0	0	0	0	0	0,00 %	0
521211	Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000140. Belanja Bahan Cetak, Penggandaan, dan Bahan Lainnya	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000141. Makan Rapat Biasa	0	0	0	0	0	0,00 %	0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir								
	000142. Snack Rapat Biasa	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000144. Belanja Bahan Cetak, Penggandaan, dan Bahan Lainnya	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000145. Makan	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000146. Snack	0	0	0	0	0	0,00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000147. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000148. Penginapan	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000149. Transport	0	0	0	0	0	0,00 %	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000150. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	0	0	0	0	0	0,00 %	0
BMB.002	Kehumasan	8.376.000	0	3.466.000	1.536.000	5.002.000	59,72 %	3.374.000

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong Audited Tahun 2025

100	Tidak Ada Komponen	8.376.000	0	3.466.000	1.536.000	5.002.000	59,72 %	3.374.000
100.0A	Pelaksanaan Publikasi	8.376.000	0	3.466.000	1.536.000	5.002.000	59,72 %	3.374.000
521211	Belanja Bahan	1.500.000	0	0	0	0	0,00 %	1.500.000
	000153. Belanja Bahan Cetakan, Penggandaan, dan Bahan Lainnya	1.500.000	0	0	0	0	0,00 %	1.500.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.052.000	0	2.402.000	1.536.000	3.938.000	77,95 %	1.114.000
	000154. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	1.152.000	0	1.152.000	0	1.152.000	#####	0
	000155. Biaya Penginapan	1.600.000	0	1.250.000	0	1.250.000	78,13 %	350.000
	000156. Transport	2.300.000	0	0	1.536.000	1.536.000	66,78 %	764.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.824.000	0	1.064.000	0	1.064.000	58,33 %	760.000
	000157. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Papua Barat)	1.824.000	0	1.064.000	0	1.064.000	58,33 %	760.000
BMB.003	Pameran/Eksibisi	0	0	0	0	0	0,00 %	0
100	Tidak Ada Komponen	0	0	0	0	0	0,00 %	0
100.0A	Pelaksanaan Pameran/Eksibisi	0	0	0	0	0	0,00 %	0
521211	Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0,00 %	0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir								
	000151. Belanja Bahan Cetakan, Penggandaan, dan Bahan Lainnya	0	0	0	0	0	0,00 %	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0,00 %	0
	000152. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Papua Barat)	0	0	0	0	0	0,00 %	0
WA.4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	15.087.000	0	12.786.691	1.520.000	14.306.691	94,83 %	780.309
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15.087.000	0	12.786.691	1.520.000	14.306.691	94,83 %	780.309
EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	15.087.000	0	12.786.691	1.520.000	14.306.691	94,83 %	780.309
100	Tidak Ada Komponen	15.087.000	0	12.786.691	1.520.000	14.306.691	94,83 %	780.309
100.0A	Rekomendasi Kepatuhan Internal	15.087.000	0	12.786.691	1.520.000	14.306.691	94,83 %	780.309
521211	Belanja Bahan	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	#####	0
	000195. Makan Rapat Biasa (Papua Barat Daya)	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	#####	0
	000196. Snack Rapat Biasa (Papua Barat Daya)	560.000	0	560.000	0	560.000	#####	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.475.000	0	9.770.691	0	9.770.691	93,28 %	704.309
	000158. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	5.311.000	0	4.608.000	0	4.608.000	86,76 %	703.000
	000159. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Gol III	1.041.000	0	1.040.100	0	1.040.100	99,91 %	900
	000160. Transport	4.123.000	0	4.122.591	0	4.122.591	99,99 %	409
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.812.000	0	1.216.000	1.520.000	2.736.000	97,30 %	76.000
	000161. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	2.812.000	0	1.216.000	1.520.000	2.736.000	97,30 %	76.000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir								

2. Kondisi Keuangan Yang Memerlukan Perhatian Khusus

a. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1) Pendapatan Negara dan Hibah

Uraian Akun	Realisasi s.d. 31 Des 2025	Realisasi s.d. 31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B – C)	E (D / C x 100%)
PNBP Lainnya	3,401,897,339	2,892,799,189	509,080,250	17,59%

Kenaikan realisasi PNBP Lainnya disebabkan oleh kenaikan realisasi Bea Lelang Pegadaian dibanding Audited 2024.

2) Belanja Negara

Tidak terdapat akun-akun yang mengalami kenaikan atau penurunan secara signifikan dibanding dengan periode sebelumnya.

b. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Neraca

1) Aset

Uraian Akun	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B – C)	E (D / C x 100%)
Kas Lainnya dan Setara Kas	205,000,000	1,005,574,357	(800,574,357)	(79,61%)

Nominal di atas merupakan Dana Pihak Ketiga yang Belum Dipindahbukukan berupa Uang Jaminan Lelang yang belum diambil pada di Bendahara Penerimaan.

2) Kewajiban

Uraian Akun	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B - C)	E (D / C x 100%)
Utang kepada Pihak Ketiga	205,000,000	1,008,738,839	803,738,839	79,68%

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan Nominal tersebut berasal dari bea materai yang belum dipindahbukukan sebesar Rp205,000,000.

3) Ekuitas

Informasi terkait perubahan ekuitas dijelaskan dalam poin (d) di bawah.

c. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Laporan Operasional (LO)

1) Pendapatan

Uraian Akun	Realisasi s.d. 31 Des 2025	Realisasi s.d. 31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B - C)	E (D / C x 100%)
PNBP Lainnya	3,341,799,339	2,829,799,189	512,000,150	18,093%

Kenaikan realisasi PNBP Lainnya disebabkan oleh kenaikan realisasi Bea Lelang Pegadaian dibanding Audited 2024.

2) Beban

Uraian Akun	Realisasi s.d. 31 Des 2025	Realisasi s.d. 31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B - C)	E (D / C x 100%)
Beban Persediaan	81,384,206	54,56,564	(26,816,642)	(49,14%)
Beban Pemeliharaan	397,547,377	315,311,243	(82,236,134)	(26,081%)
Beban Perjalanan Dinas	520,662,542	619,653,036	(98,990,494)	(15,97%)

Penurunan pada pos Beban disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025.

d. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Uraian Akun	Realisasi s.d. 31 Des 2025	Realisasi s.d. 31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B - C)	E (D / C x 100%)
Surplus/Defisit -LO	1,105,971,284	13,021,132,395	910,386,305	6,99%
Transaksi Antar Entitas	1,277,512,242	285,113,932	1,562,626,174	548,07%

Surplus LO disebabkan oleh penurunan Beban pada Laporan Operasional yang cukup signifikan pada tahun 2025. Sementara penurunan pada Transaksi Antar Entitas disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja karena efisiensi tahun 2025.

LAMPIRAN 3 CAPAIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN

Fungsi : 01 Pelayanan Umum
Sub Fungsi: 01.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

LAPORAN REALISASI KINERJA
Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-13
Kementerian Negara/Lembaga : 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Eselon 1 : 015.09 - DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Wilayah/Provinsi : 33.51 - KOTA SORONG LAMA/PAPUA BARAT
Satuan Kerja : 537990 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 18-02-2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	2,743,518,000.00	2,075,537,515.00	75.65%							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	2,743,518,000.00	2,075,537,515.00	75.65%							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	619,993,000.00	446,115,394.00	71.95%							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	170,017,000.00	54,144,250.00	31.85%							
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	170,017,000.00	54,144,250.00	31.85%							
001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	160,806,000.00	50,109,250.00	31.16%	403.0000	Orang	403.0000	100%	68.84%		
002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	2,700,000.00	2,425,000.00	89.81%	7.0000	Orang	20.0000	100%	10.19%		
003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	6,511,000.00	1,610,000.00	24.73%	17.0000	Orang	17.0000	100%	75.27%		
4798	Pengelolaan Aset	449,976,000.00	391,971,144.00	87.11%							
AAH	Peraturan lainnya	181,956,000.00	173,827,677.00	95.53%							
001	Keputusan Pemohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	143,932,000.00	141,054,345.00	98%	100.0000	Surat Keputusan	100.0000	100%	2%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	38,024,000.00	32,773,332.00	86.19%	2.0000	Surat Keputusan	2.0000	100%	13.81%		
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	36,192,000.00	36,033,074.00	99.56%							
002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	36,192,000.00	36,033,074.00	99.56%	280.0000	Rekomendasi Kebijakan	280.0000	100%	0.44%		
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	47,376,000.00	46,418,271.00	97.98%							
001	Risalah Lelang	47,376,000.00	46,418,271.00	97.98%	200.0000	Dokumen	200.0000	100%	2.02%		
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	160,584,000.00	118,117,768.00	73.56%							
004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	16,668,000.00	14,640,940.00	87.84%	1.0000	Rekomendasi	1.0000	100%	12.16%		
005	Rekomendasi Hasil Penilaian	70,348,000.00	70,314,391.00	99.95%	3.0000	Rekomendasi	3.0000	100%	0.05%		
007	Penggalan Potensi Lelang	73,568,000.00	33,162,437.00	45.08%	3.0000	Rekomendasi	3.0000	100%	54.92%		
UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	23,868,000.00	17,574,354.00	73.63%							
201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	23,868,000.00	17,574,354.00	73.63%	167.0000	Rekomendasi	167.0000	100%	26.37%		
WA	Program Dukungan Manajemen	2,123,525,000.00	1,629,422,121.00	76.73%							
4700	Legislasi dan Litigasi	36,304,000.00	32,268,597.00	88.88%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	36,304,000.00	32,268,597.00	88.88%							
969	Layanan Bantuan Hukum	36,304,000.00	32,268,597.00	88.88%	6.0000	Layanan	6.0000	100%	11.12%		
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,010,891,000.00	1,577,844,833.00	78.46%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	13,000,000.00	6,500,000.00	50%							
001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	13,000,000.00	6,500,000.00	50%	1.0000	Unit	1.0000	100%	50%		
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,515,091,000.00	1,315,944,833.00	86.86%							
002	Kerumahtanggaan	91,140,000.00	70,757,231.00	77.64%	12.0000	Layanan	12.0000	100%	22.36%		
994	Layanan Perkantoran	1,423,951,000.00	1,245,187,602.00	87.45%	12.0000	Layanan	12.0000	100%	12.55%		
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	482,800,000.00	255,400,000.00	52.9%							
001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	454,800,000.00	227,400,000.00	50%	42.0000	Unit	42.0000	100%	50%		
003	Kendaraan Bermotor	28,000,000.00	28,000,000.00	100%	1.0000	Unit	1.0000	100%	0%		
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	46,156,000.00	5,002,000.00	10.84%							
BMB	Komunikasi Publik	46,156,000.00	5,002,000.00	10.84%							
001	Pembinaan/Edukasi Publik	28,480,000.00	0.00	0%	20.0000	Orang	0.0000	0%	0%		
002	Kehumasan	15,252,000.00	5,002,000.00	32.8%	5.0000	Kegiatan	5.0000	100%	67.2%		
003	Pameran/Eksibisi	2,424,000.00	0.00	0%	1.0000	Kegiatan	0.0000	0%	0%		
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	30,174,000.00	14,306,691.00	47.41%							
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,174,000.00	14,306,691.00	47.41%							
001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	30,174,000.00	14,306,691.00	47.41%	5.0000	Dokumen	5.0000	100%	52.59%		

LAMPIRAN 4 TELAHAH ATAS LAPORAN KEUANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

TELAAH LAPORAN KEUANGAN LAYER 1 TINGKAT SATKER

NO	Jenis Telaah	Transaksi	Kode Telaah	Nama Telaah	Kode BA	Kode BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Periode	LO	LRA	Selisih
1	LRA VS LO PENDAPATAN				015	01509	537990	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG	13	-3.401.897.339	-3.401.897.339	0
2	LRA VS LO BELANJA BARANG DAN JASA				015	01509	537990	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG	13	780.603.910	782.096.510	-1.492.600
3	LRA VS LO BELANJA PERJALANAN DINAS				015	01509	537990	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG	13	520.662.542	520.662.542	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

TELAAH LAPORAN KEUANGAN LAYER 1 TINGKAT SATKER

NO	Jenis Telaah	Kode BA	Kode BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Transaksi	Uraian Transaksi	Akumulasi Penyusutan Amortisasi Tahun Berjalan	Beban Penyusutan Amortisasi Tahun_Berjalan	Selisih
1	LO VS Neraca Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya vs Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	015	01509	537990	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG			220.754.033	0	220.754.033
2	LO VS Neraca Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan vs Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	015	01509	537990	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG			89.854.868	89.854.868	0
3	LO VS Neraca Beban Penyusutan/Amortisasi vs Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Seluruh Jenis Aset Tetap dan Aset Lainnya)	015	01509	537990	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG			302.756.520	515.728.020	-212.971.500
4	LO VS Neraca Beban Penyusutan vs Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	015	01509	537990	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG			-7.852.381	425.873.152	-433.725.533

